

IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF INTERNAL QUALITY GUARANTEE PROGRAMS IN STATE JUNIOR HIGH SCHOOL 8 YOGYAKARTA

Roro Pamelanintyas
Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY
pamelanintyas@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta serta faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, kondensasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi dari tokoh Charles O. Jones yaitu : 1) Pengorganisasian, pelaksana telah dibentuk melalui SK Kepala Sekolah terkait tim penjaminan mutu sekolah, *management*, jadwal kegiatan. Interpretasi, sosialisasi telah dilakukan setiap tahun ajaran dan komitmen tinggi pelaksana program. Aplikasi/Penerapan, Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan siklus yang dilakukan setiap tahunnya dan memiliki kegiatan-kegiatan, Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan pemetaan, perencanaan RKS/RKJM, penerapan RKS/RKJM, monitoring dan evaluasi, penetapan standar mutu baru. 2) Faktor pendukung program yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, komitmen tim penjamin mutu sekolah. Faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman terkait program SPMI, sarana dan prasarana kurang memadai, banyaknya program yang dijalankan, waktu yang terbatas, evaluasi dan tindak lanjut kurang diperhatikan.

Kata kunci: *implementasi program, Sistem Penjaminan Mutu Sekolah (SPMI), SMP Negeri 8 Yogyakarta.*

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) program at State Junior High School 8 Yogyakarta as well as the supporting and inhibiting factors of program implementation. This type of research is descriptive qualitative. The validity of the data uses source triangulation and technique triangulation. Data analysis techniques using an interactive model developed by Miles, Huberman and Saldana consisting of data collection, data presentation, condensation and conclusion drawing. The results of this study indicate that: the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) program at State Junior High School 8 Yogyakarta using the theory of implementation of the figure Charles O. Jones, namely: 1) Organizing, implementing has been formed through the Principal's Decree related to the school quality assurance team, management, schedule of activities. Interpretation, socialization has been carried out every school year and program implementers are highly committed. Application / Application, the Internal Quality Assurance System Program (SPMI) is a cycle that is carried out annually and has activities, School Self Evaluation (EDS) and mapping, RKS / RKJM planning, implementation of RKS / RKJM, monitoring and evaluation, setting quality standards new. 2) Supporting factors for the program are school principal support, school committee support, school quality assurance team commitment. Inhibiting factors are lack of understanding related to the SPMI program, inadequate facilities and infrastructure, a large number of programs being run, limited time, evaluation and follow-up are not given enough attention.

Keyword: program implementation, School Quality Assurance System (SPMI), State Junior High School 8 Yogyakarta

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan di semua aspek kehidupan manusia. Pada era globalisasi saat ini, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Perubahan ini menyebabkan adanya persaingan global yang sangat ketat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, manusia dituntut untuk dapat mengikuti zaman dengan ikut serta dalam era persaingan global.

Pendidikan di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Mutu pendidikan Indonesia masih rendah itu ditunjukkan dari data Balitbang (2003) dari 20.918 SMP di Indonesia ternyata hanya 8 sekolah yang mendapatkan pengakuan dunia dalam kategori *The Middle Years Program* (MYP).

Menurut CNN Jakarta, pada tahun 2014 posisi pendidikan di Indonesia memprihatinkan. *The Learning Curve Pearson* 2014, sebuah lembaga pemeringkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir dalam mutu pendidikan di dunia. Pada tahun 2015 mutu pendidikan di Indonesia masih saja berada di 10 negara yang memiliki mutu pendidikan yang rendah, peringkat tersebut didapat dari *Global School Ranking*.

Masalah mutu pendidikan di Indonesia masih menjadi kendala yang belum bisa terpecahkan dengan rendahnya 8 Standar Mutu Pendidikan (SNP). Rendahnya mutu-mutu tersebut berakar dari permasalahan yang terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak terkait dengan pendidikan.

Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu solusi

dalam mengatasi mutu pendidikan di Indonesia. SPMI sendiri dilatarbelakangi dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan Nasional yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program Sistem Penjaminan Mutu Sekolah (SPMI) melalui sekolah model. Sekolah model merupakan sekolah yang dipilih sebagai contoh sekolah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk di bina dan dapat meningkatkan kualitas mutu sekolah agar dapat memenuhi 8 standar SNP.

Saat ini masih ada sekolah yang belum menerapkan program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Beberapa sekolah belum menerapkan program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di karenakan, kurangnya kesadaran dan komitmen komponen sekolah untuk menjalankan program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di anggap beban bagi sekolah karena kurangnya waktu dan banyaknya program yang di jalankan.

Berdasarkan fakta di atas dapat diketahui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP belum maksimal, sementara disisi lain SMP Negeri 8 Yogyakarta telah menjadi contoh dari keberhasilan program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan telah memberi gambaran langsung terkait pelaksanaan program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

SMP Negeri 8 Yogyakarta merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang menjadi contoh sekolah model pada tahun ajaran 2016/2017 di kota Yogyakarta yang telah menjalankan program Sistem Penjaminan Mutu Internal. SMP Negeri 8 Yogyakarta sendiri memiliki tanggung jawab untuk dapat menerapkan praktik program Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) di 5 sekolah disekitarnya yang disebut

sebagai sekolah imbas

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta faktor pendukung dan faktor penghambat program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 8 Yogyakarta.

Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2012: 106), Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan tertentu.

Mazmanian dan Sebastiar (Wahab, 2005:68), implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Menurut Chales O. Jones (Arif Rohman, 2012:106) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi/penerapan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP). Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu kebijakan dari Departemen Pendidikan Nasional yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. SPMP membutuhkan data terkait dengan kondisi sebenarnya sekolah yang digunakan untuk pemetaan sekolah. Untuk itu, sekolah diminta mengevaluasi diri mereka sendiri dengan mengacu pada komponen dari Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) di bagi menjadi 2 yaitu. a) Sistem

Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. b) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan.

Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terdiri atas: pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah, pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan dan penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sugiono (2018:15) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* di gunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan data dengan triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 8 Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Kahar Muzakir No 2 Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada 05 November 2018 sampai 15 Juni 2019.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini seluruh tim penjamin mutu SMP Negeri 8 Yogyakarta yaitu: kepala sekolah, ketua, sekretaris dan anggota tim penjamin mutu sekolah. Objek penelitian yaitu implementasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan sesuai dengan teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan langkah: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*).

Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber maupun teknik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta

Penelitian ini mendeskripsikan implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 8 Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi program dari tokoh Charles O. Jones (Arif Rohman, 2012:106) yang mengkaji implementasi program dengan menggunakan tiga pilar aktivitas pengorganisasian yaitu : pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi/penerapan.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan

Jones tersebut, maka peneliti melihat bahwa masalah implementasi program semakin lebih jelas dan luas, dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dengan alasan tersebut peneliti menganalisis Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta menggunakan teori dari tokoh Charles O. Jones. Karena dengan teori yang dikemukakan Charles O. Jones masalah implementasi program semakin jelas dan luas maka peneliti akan lebih mudah melihat masalah yang ada dalam implementasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diteliti:

a) Pengorganisasian

Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan, yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi.

Charles O. Jones (1984:176) mengemukakan bahwa *“the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development.”* Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program-program yang telah dirancang.

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Sumberdaya manusia atau SDM menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program kebijakan, karena kalau tidak ada pelaksana program kebijakan, maka siapa yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam konteks program Sistem Penjaminan Mutu

Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta, sekolah ini telah membentuk tim penjaminan mutu sekolah sebagai pelaksana inti dalam menjalankan program sistem penjaminan mutu internal yang ada di sekolah. Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal melalui SK Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta.

Tim Penjaminan Mutu SMP Negeri 8 Yogyakarta telah melaksanakan tugas sesuai *jobdesk* masing-masing. Walau sudah di bagi tugas masing-masing namun tim penjaminan mutu SMP Negeri 8 Yogyakarta saling membantu dan bekerjasama serta saling mengingatkan. Pengelolaan SPMI SMP Negeri 8 Yogyakarta mengacu pada model PDCA (Plan, Do, Check, Action) dimana semua kegiatan dilaksanakan secara bersiklus. Semua unit kerja membuat program kerja dan mekanisme pelaksanaannya yang di pantau secara berkelanjutan untuk perbaikan kegiatan berikutnya. Pada setiap kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan berdasarkan pada standar tertentu untuk mengukur kinerja atau tujuan serta di tetapkan pada buku manual sebagai petunjuk teknis pelaksanaan dan evaluasi peningkatan

Tujuan Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem penjaminan Mutu SMP Negeri 8 Yogyakarta dalam rangka mewujudkan visi SMP Negeri 8 Yogyakarta dan mencapai target mutu yang di tetapkan. b. Melakukan monitoring dan evaluasi mutu layanan akademik dan non akademik. c. Melaporkan pelaksanaan audit internal untuk ditindaklanjuti. d. Melaksanakan pendampingan dalam penyelenggaraan sistem penjaminan mutu program studi. e. Menjadi penjamin mutu untuk kegiatan akademik dan non akademik.

b) Interpretasi

Aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan. Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan.

Dimensi interpretasi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam dimensi komunikasi.

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut. Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pembagian tugas dari komponen tim penjaminan mutu di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Para pelaksana mengetahui *jobdesk* masing-masing guna memperlancar program yang dilaksanakan.

Setelah di bentuk tim penjaminan mutu SMP Negeri 8 Yogyakarta dan serta sistematis telah di bagi tugas masing-masing pelaksana program SPMI di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Maka di adakannya sosialisasi program SPMI agar semua komponen yang dapat ikutserta dalam keberhasilan program SPMI yang di jalankan serta dapat memahami tugas masing-masing komponen. Sosialisasi program SPMI di lakukan pada setiap tahun. Pada tahun ajaran 2018/2019, sosialisasi program SPMI telah dilakukan pada 28 November 2018.

Sementara itu, Charles O. Jones mengemukakan lebih lanjut bahwa selain patokannya harus jelas, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Bagaimana para pelaksana akan melaksanakan tugasnya tergantung pada sejumlah keadaan, dimana hal terpenting pada masalah ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan estimasi ketersediaan sumber daya.

Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penafsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

c) Aplikasi / Penerapan

Aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari

pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones (1984:180) menyatakan bahwa *“Application simply refers to doing the job. It includes “providing goods and services” as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense).”*

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Pada Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 8 Yogyakarta telah di buat prosedur kerja dan jadwal kegiatan setiap siklus nya secara sistematis. Telah dilakukannya rapat koordinasi untuk memberi tahu semua pihak yaitu Tim Penjaminan Mutu SMP Negeri 8 Yogyakarta.

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat dinamis. Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas.

Aplikasi/penerapan dalam program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) meliputi siklus SPMI yang dilakukan setiap satu tahun ajaran baru kegiatan-kegiatan meliputi :

1) Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pemetaan.

Kemdikbud (2016: 21) menjelaskan, pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dengan mengacu pada SNP. Pemetaan mutu melibatkan seluruh komponen satuan pendidikan dan pemangku kepentingan, seperti: kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orang tua,

peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Setiap personel tersebut memiliki peran sesuai posisi masing-masing.

2) Perencanaan RKS/RKJM.

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah melalui tim pengembang sekolah menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dan mempergunakannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang yang membutuhkan perhatian, yang kemudian akan menjadi dasar bagi rencana pemenuhan mutu. Selain itu, rencana pemenuhan mutu disusun berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan. Rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan.

3) Penerapan RKS/RKJM.

Pelaksanaan pemenuhan standar mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikannya. Proses implementasi dari rencana tersebut dijabarkan dan diatur pelaksanaannya dalam level ruang kelas, level antar jenjang kelas dan level satuan pendidikan agar pelaksanaan perencanaan tersebut berjalan optimal. Berdasarkan Rencana Kerja Sekolah yang telah di susun berdasarkan Pemetaan EDS. Selanjutnya Rencana Kerja Sekolah di implementasikan dalam periode yang telah di tentukan (satu semester maupun dalam satu tahun).

4) Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengukur ketercapaian program-program strategis yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi terutama ditujukan untuk mengetahui kinerja sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan unsur-unsur yang lain dalam standar nasional pendidikan. Evaluasi/ audit secara

internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Laporan dari hasil evaluasi adalah; (i) pemenuhan 8 SNP, dan (ii) hasil implementasi dari rencana aksi.

5) Standar Mutu Baru.

Evaluasi pemenuhan mutu merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi yang direncanakan dan apakah strategi tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

Luaran dari kegiatan evaluasi pemenuhan mutu adalah laporan pelaksanaan pemenuhan SNP dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu dirumuskan rekomendasi tindakan perbaikan jika ditemukan adanya penyimpangan dari rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu. Dengan demikian ada jaminan kepastian terjadinya peningkatan mutu secara berkelanjutan (Kemdikbud; 2016: 15).

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a) Faktor Pendukung

Faktor pendukung program yaitu: dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, kerjasama dan komitmen tim penjamin mutu sekolah.

b) Faktor Penghambat

Faktor penghambat yaitu: kurangnya pemahaman terkait program SPMI, sarana dan prasarana kurang memadai, banyaknya program yang dijalankan, waktu yang terbatas, evaluasi dan tindak lanjut kurang diperhatikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Implementasi Program Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP Negeri 8 Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi dari tokoh Charles O. Jones yang mengkaji implementasi program dengan menggunakan tiga pilar aktivitas

pengorganisasian yaitu : pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi/penerapan. Pengorganisasian, pelaksana telah dibentuk melalui SK Kepala Sekolah terkait tim penjaminan mutu sekolah, *management*, jadwal kegiatan. Interpretasi, sosialisasi telah dilakukan setiap tahun ajaran dan komitmen tinggi pelaksana program. Aplikasi/Penerapan, Program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan siklus yang dilakukan setiap tahunnya dan memiliki kegiatan-kegiatan, Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Pemetaan, Perencanaan RKS/RKJM, Penerapan RKS/RKJM, monitoring dan evaluasi, standar mutu baru

Faktor pendukung program yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan komite sekolah, kerjasama dan komitmen tim penjamin mutu sekolah. Faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman terkait program SPMI, sarana dan prasarana kurang memadai, banyaknya program yang dijalankan, waktu yang terbatas, evaluasi dan tindak lanjut kurang diperhatikan.

Saran

Perlu dilakukannya sosialisasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tiap tahun mengingat ada beberapa komponen sekolah masih belum mengerti tujuan dari di laksanakan program ini. Sebaiknya berkas atau dokumen terkait Program sistem penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta di tata dan di kumpulkan menjadi satu agar lebih mudah untuk monitoring dan mengevaluasi program. Perlu adanya pembaharuan tim penjaminan mutu SMP Negeri 8 Yogyakarta mengingat ada beberapa guru yang sudah pension.

Mohon lebih memperhatikan *Management* waktu agar jadwal program ataupun jadwal kegiatan tidak berbenturan dengan program dan kegiatan yang lainnya. Perlu adanya tindak lanjut evaluasi program Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar program selanjutnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdikbud. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di akses tanggal 14 November 2018 dari www.inherentdikti.net/files/sisdiknas.pdf.
- Ghufroon, Anik dkk. (2009). *Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah Di Yogyakarta*. Lembaga Penelitian UNY.
- Hasbullah, M. 2016. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Juni Noor Rohman. (2016) . *Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kemdikbud. (2012). *Prosiding: Riset Kebijakan Pendidikan Anak di Indonesia*. UNICEF Indonesia: Lembaga Penelitian SMERU.
- Kemdikbud. (2016). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dasar dan Menengah*. Jakarta : Kemdikbud.
- Kemdikbud. (2016). *Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, Sadana, J. (2014). *Qualitativ e Data Analyzis*. California: Sage Publication.
- Moelong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, Juni N. (2016) . *Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suharno. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukaryanti, Binarsih. (2018). *Manajemen Sekolah Model Penjamin Mutu Internal (SPMI) di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta*. Tesis. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Yogyakarta. Tim Penjaminan Mutu Sekolah Mengah Pertama Negeri 8 Yogyakarta. Tahun Ajaran 2018/2019.
- Wahab, S. A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.